

Katalog: 9199007.16

ISSN 2527-8002



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023

Volume 5, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

<https://sumsel.bps.go.id>

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023

Volume 5, 2024

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023

Volume 5, 2024

Katalog: 9199007.16

ISSN: 2527-8002

Nomor Publikasi: 16000.24015

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xii+70 halaman

Penyusun Naskah: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pembuat Cover: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penerbit: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Ilustrasi: *canva.com, freepik.com*

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Sumatera Selatan

TIM PENYUSUN
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023
Volume 5, 2024

Pengarah : Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, SST, M.Si

Penanggung Jawab : Marpaleni, M.A., Ph.D

Penyunting : Marpaleni, M.A., Ph.D

Penulis Naskah : Lia Nurliana, S.Si, M.Si

Desi Eryani, S.ST, M.Si

Financy Ramadhani, S.ST., M.E.K.K

Penata Letak : Desi Eryani, S.ST, M.Si

Pembuat Kover : Desi Eryani, S.ST, M.Si

KATA PENGANTAR

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan 2023 merupakan salah satu publikasi tahunan BPS Provinsi Sumatera Selatan yang menyajikan data dari berbagai sumber, baik dari BPS maupun institusi lain. Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai kinerja perekonomian Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2023.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini mengenai perkembangan perekonomian Sumatera Selatan, kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi sektor perdagangan, sektor, keadaan pariwisata, serta kondisi ketenagakerjaan.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup data nasional dan data provinsi yang ditampilkan secara tahunan maupun bulanan. Selain itu, juga disajikan menurut peran gender serta kondisi wilayah perkotaan dan perdesaan pada beberapa indikator.

Publikasi ini dapat terbit berkat adanya kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca. Tanggapan dan saran yang membangun kami harapkan untuk perbaikan penyusunan publikasi mendatang.

Palembang, Juni 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Moh. Wahyu Yulianto, SST, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan 2023

Volume 5, 2024

Halaman

TIM PENYUSUN	iii	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	ix	
DAFTAR GAMBAR	xi	
BAB I	TINJAUAN EKONOMI SUMATERA SELATAN	1
BAB II	PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA SELATAN	11
BAB III	INFLASI	19
BAB IV	PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN	29
BAB V	PARIWISATA SUMATERA SELATAN	39
BAB VI	KETENAGAKERJAAN SUMATERA SELATAN	49
BAB VII	PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2023	14
Tabel 2.2 Distribusi PDRB (persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2023	16
Tabel 4.1 Ekspor Sumatera Selatan menurut Sektor, 2019-2023 (juta US\$)	34
Tabel 4.2 Impor Sumatera Selatan menurut Sektor, 2018-2023 (juta US\$)	38
Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023	52
Tabel 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023	54
Tabel 6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023	55
Tabel 6.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023	57
Tabel 6.5 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan (persen), 2019-2023	3
Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), 2023**	4
Gambar 1.3 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (y-on-y) (persen), 2023	6
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan TPT Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023	8
Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional (Year-to-Date), Tahun 2017-2023	23
Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan (y-on-y), 2021-2023	24
Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan (m-on-m), 2021-2023	25
Gambar 4.1 Perkembangan Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Sumatera Selatan (juta US\$), 2019-2023	32
Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Sumatera Selatan, 2020-2023	44
Gambar 5.2 Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan, 2023	45
Gambar 5.3 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hote Berbintang di Sumatera Selatan (persen), 2021-2023	46
Gambar 5.4 Rata-rata Lama Menginap Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Selatan, 2021-2023	47

Gambar 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan, 2023	58
Gambar 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan, 2023	59
Gambar 6.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023	61
Gambar 6.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	62
Gambar 6.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/ Informal di Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2023	64

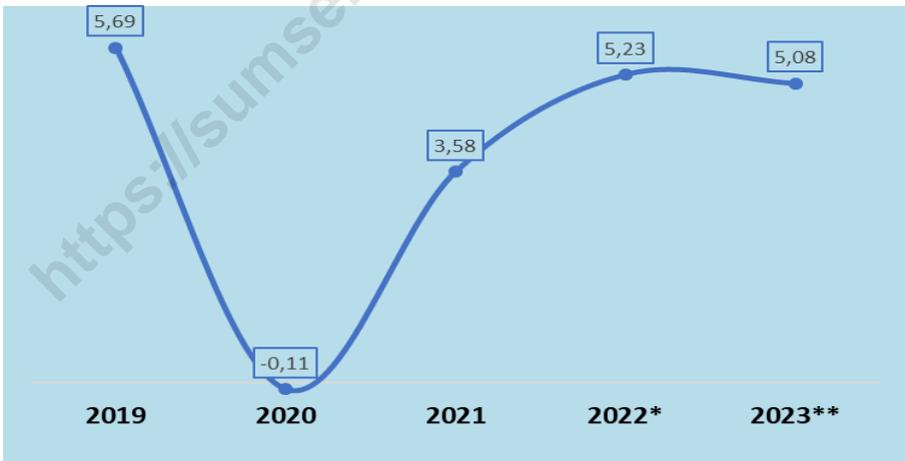
<https://sumsel.bps.go.id>

The image features a dark background with several financial charts. In the upper left, a magnifying glass is positioned over a bar chart with red and blue bars. Below it, another bar chart is visible. At the bottom, a candlestick chart with red and blue bars is shown. The right side of the image is a solid teal color with a white crosshair in the top right corner and another white crosshair in the bottom left corner.

TINJAUAN EKONOMI SUMATERA SELATAN

<https://sumsel.bps.go.id>

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mencatat angka 5,08 persen, sedikit melambat dibanding pencapaian sebesar 5,23 persen tahun sebelumnya. Grafik pertumbuhan ekonomi dari 2019 hingga 2023 menggambarkan perjalanan yang dinamis, dengan puncak tertinggi pada 2019 sebesar 5,69 persen, kemudian mengalami kontraksi hingga -0,11 persen pada 2020 akibat pandemi global. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan 3,58 persen, dan melonjak signifikan pada 2022. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor, inflasi yang tinggi pada tahun sebelumnya, serta peningkatan nilai impor, mempengaruhi kinerja ekonomi pada 2023. Sumatera Selatan terus berusaha dan beradaptasi, menghadapi dinamika global dan lokal dengan ketangguhan dan strategi yang terukur.

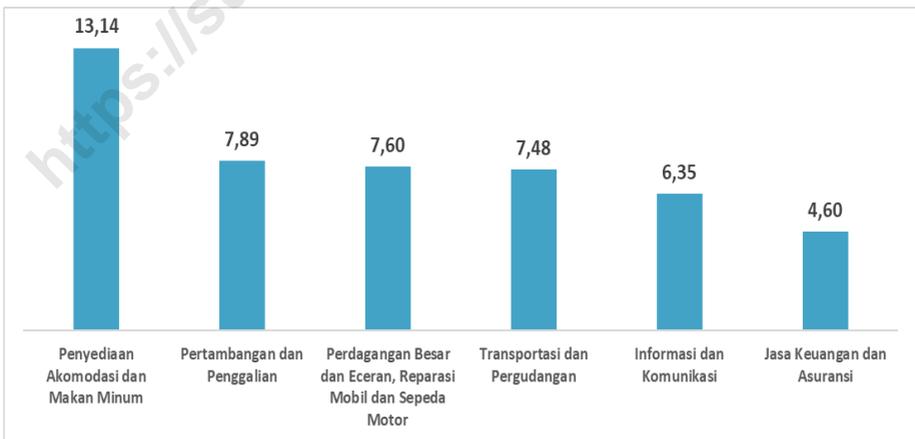


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan (persen), 2019-2023

Kinerja ekonomi tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan terutama ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan seiring perbaikan harga komoditas. Aktivitas masyarakat yang kembali normal turut mendorong aktivitas konsumsi yang meningkatkan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sehingga lapangan usaha ini menjadi penopang besar urutan ketiga di Sumatera Selatan pada tahun 2023 .

Perbaikan kinerja ekonomi tahun 2023 juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya ditopang oleh peningkatan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penerapan beberapa agenda dari pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas di lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan di tahun 2023, yang berdampak peningkatan aktivitas konsumsi yang secara tidak langsung ikut mendorong meningkatnya kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), 2023**

Tiga kategori utama dengan kontribusi terbesar dalam Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2023 adalah kategori pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh positif selama 2023.

Dilihat dari pertumbuhan menurut lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar yang tumbuh sebesar 13,14 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,89 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,60 persen.

Tingginya pertumbuhan pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didorong oleh kenaikan tingkat hunian kamar seiring membaiknya pariwisata dan regulasi bisnis. Selain itu, perbaikan infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan tol, jalan raya meningkatkan aksesibilitas ke Provinsi Sumatera Selatan. Program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal, seperti pendanaan untuk UMKM atau mempermudah regulasi sertifikasi label halal berdampak pada meningkatnya daya saing dan pertumbuhan sektor tersebut.

Dari sisi penggunaan, sebagian besar PDRB tahun 2023 digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, dengan proporsi mencapai 60,63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih berkelanjutan, perlu dilakukan diversifikasi penggunaan PDRB, seperti meningkatkan

investasi di sektor produktif dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah.

Di sisi lain pengeluaran untuk kapital, yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto mempunyai andil yang cukup besar di Provinsi Sumatera Selatan. Andil PMTB terhadap perekonomian Sumatera Selatan mencapai 30,37 persen pada tahun 2023. Adapun proporsi konsumsi akhir pemerintah tidak terlalu besar yaitu 5,89 persen di tahun 2023. Nilai net ekspor antar daerah bernilai negatif yang menunjukkan bahwa nilai perdagangan domestik antar provinsi menunjukkan defisit.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (*y-on-y*) (persen), 2023

Grafik 1.3 menampilkan dinamika pertumbuhan komponen PDRB Sumatera Selatan tahun 2023 menurut penggunaan. Impor luar negeri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 26,45 persen, menunjukkan peningkatan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung produksi domestik. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 6,78

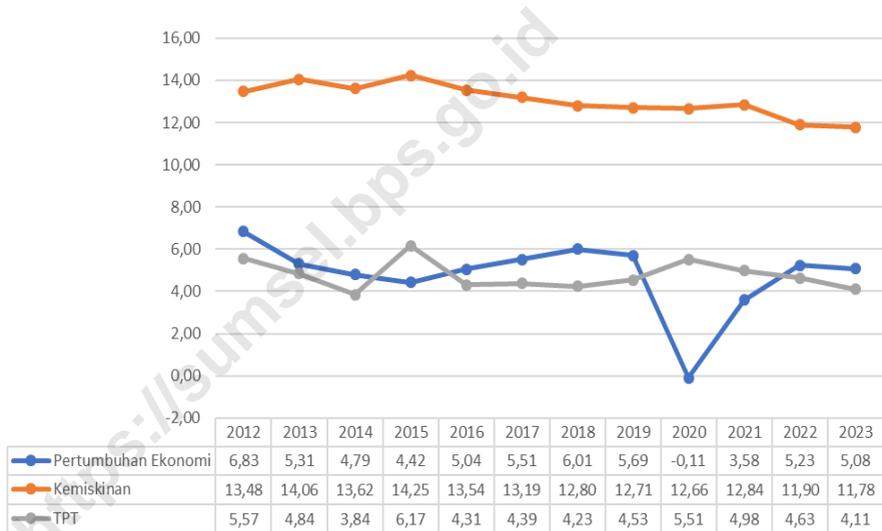
persen, sementara konsumsi rumah tangga meningkat 5,27 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang cukup kuat. Konsumsi pemerintah bertambah 5,10 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) naik 2,47 persen, menunjukkan investasi dalam aset tetap yang masih berjalan meskipun lambat. Sebaliknya, ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar -4,54 persen, mengindikasikan tantangan dalam daya saing produk ekspor Sumatera Selatan di pasar global. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan konsumsi domestik dan impor, perlu ada upaya untuk memperkuat ekspor dan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan

Walau melambat, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2023 masih mencatat pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Kondisi ini diiringi oleh penurunan angka kemiskinan dari 12,84 persen pada tahun 2022 menjadi 11,78 persen pada tahun 2023, serta perbaikan gini ratio. Perbaikan ini mencerminkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di tengah pelambatan ekonomi, memberikan gambaran positif bahwa meskipun laju pertumbuhan melambat, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus membuahkan hasil.

Hasil Sakernas Agustus 2023 juga mencatat penurunan tingkat pengangguran dari 4,63 persen menjadi 4,11 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meski pertumbuhan ekonomi tidak secepat tahun sebelumnya, pasar tenaga kerja tetap menunjukkan perkembangan positif. Meskipun indikator ekonomi seperti

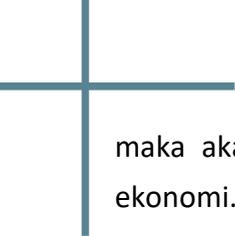
kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan perbaikan, tingginya angka tersebut masih menyoroti tantangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif menjadi langkah strategis yang krusial untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan TPT Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2012-2023

Tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam menilai kesehatan ekonomi daerah. Jika inflasi meningkat secara signifikan, tentunya dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Sebaliknya, jika inflasi tetap rendah dan stabil



maka akan mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan inflasi 2023 di Sumatera Selatan terjaga dalam kisaran $3,0\pm 1$ persen atau mencapai 3,17 persen (yoy). Inflasi 2023 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat 5,94 persen (yoy). Inflasi yang terjaga merupakan salah satu hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).





PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA SELATAN



<https://sumsel.bps.go.id>

Sudah lewat dari tiga tahun sejak pandemi melanda seluruh negeri tak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan. Pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan resesi hampir di seluruh dunia. Pandemi yang terjadi saat itu memberikan *multiplier effect* yang sangat luas dalam kehidupan. Krisis kesehatan, kesehatan keuangan, melonjaknya harga barang yang disebabkan terhambatnya distribusi serta meningkatnya pengangguran merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pada situasi yang sulit tersebut, pemerintah harus mengambil keputusan dengan sangat matang. Memutus mata rantai penyebaran virus dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi merupakan suatu hal yang kontradiktif.

Perlahan namun pasti, Indonesia termasuk Sumatera Selatan, mulai mencoba melepaskan diri dari jurang resesi. Upaya untuk memulihkan perekonomian melalui kebijakan berupa program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasilnya perekonomian Sumatera Selatan bangkit mencapai 3,58 persen di tahun 2021. Selanjutnya kembali melesat di tahun 2022 dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,23 persen. Akan tetapi ketidakpastian ekonomi global membawa perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sehingga pertumbuhan hanya mencapai 5,08 persen.

Jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2023, kecuali satu lapangan usaha. Ekonomi Sumatera Selatan 2023 yang mengalami perlambatan adalah lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,02 persen.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2023

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,75	2,91	3,82	2,15
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,08	5,47	6,28	7,89
C	Industri Pengolahan	0,72	2,18	4,39	3,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,67	5,76	1,46	4,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	4,83	-4,69	0,66	0,33
F	Konstruksi	-0,01	-0,02	1,27	3,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	-1,34	5,79	10,37	7,60
H	Transportasi dan Pergudangan	-5,91	-2,20	11,63	7,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,21	4,43	14,67	13,14
J	Informasi dan Komunikasi	12,79	6,04	8,12	6,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	4,19	-0,60	4,60
L	Real Estate	2,24	5,81	5,23	4,28
M,N	Jasa Perusahaan	-2,08	0,60	2,90	2,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,17	3,88	3,70	3,73
P	Jasa Pendidikan	-1,50	6,57	2,24	2,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,14	5,63	4,15	-0,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,23	0,93	2,05	1,95
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0,11	3,58	5,23	5,08

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi ialah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; diikuti Pertambangan dan Penggalian; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontraksi saat Pandemi COVID-19 sebesar 7,21 persen di tahun 2020, kemudian beranjak tumbuh mencapai 4,43 persen di tahun 2021, lalu melaju pesat di tahun 2022 hingga mencapai 14,67 persen, namun di tahun 2023 mengalami pertumbuhan melambat sebesar 13,14 persen.

Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini tercatat

telah mengalami kontraksi hingga 4,08 persen pada tahun 2020, kemudian mengalami pertumbuhan mencapai 5,47 persen di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 sektor ini terus berangsur tumbuh dan mencapai 6,28 persen. Tingginya laju pertumbuhan sektor pertambangan pasca Covid-19 menjadi signal bahwa potensi tambang di Sumatera Selatan cukup optimal. Hal tersebut dengan pertumbuhan sektor tambang yang kian meningkat yang mencapai 7,89 persen di tahun 2023.

Selanjutnya, sektor usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peningkatan aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya permintaan komoditas baik domestik maupun luar negeri sehingga turut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 26,61 persen pada tahun 2023. Sektor berikutnya yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 17,84 persen. Pertumbuhan sektor ini mencapai 3,69 persen menjadi 112,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Sektor ini semakin melaju seiring pelonggaran aktivitas serta mobilitas masyarakat di Sumatera Selatan khususnya Industri Makan dan Minum.

Tabel 2.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2023

Kategori	Uraian	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,17	14,71	13,08	13,10
B	Pertambangan dan Penggalian	18,32	21,03	27,71	26,61
C	Industri Pengolahan	19,73	19,09	17,48	17,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,10	0,10
F	Konstruksi	12,53	11,92	10,67	10,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,47	12,98	13,45
H	Transportasi dan Pergudangan	2,35	2,12	2,21	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	1,81	1,77	1,91
J	Informasi dan Komunikasi	3,29	3,21	2,91	2,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,39	2,38	2,08	2,07
L	Real Estate	3,34	3,24	2,90	2,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	2,77	2,46	2,43
P	Jasa Pendidikan	2,40	2,37	2,06	2,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,70	0,63	0,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,86	0,80	0,71	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

PDRB Menurut Pengeluaran

Dilihat dari sisi pengeluaran, empat komponen PDRB di tahun 2023 mengalami pertumbuhan. Keempat komponen tersebut yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran pemerintah, dan PMTB. Sedangkan komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. PDRB Provinsi Sumatera Selatan disumbang oleh konsumsi akhir rumah tangga sebesar 60,63 persen,

dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2020-2023 cenderung menurun. Tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 65,02 persen dan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 60,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga semakin berpikir untuk menabung (*saving*) daripada untuk konsumsi (*consumption*).

Konsumsi akhir rumah pada tahun 2020 mengalami perlambatan hingga berkontraksi dalam mencapai 1,94 persen. Hal ini tidak terlepas dari akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat dari berbagai aspek. Perekonomian Sumatera menggeliat bangkit sejak 2021 dengan kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 1,94 persen kemudian dengan adanya Pemulihan Ekonomi Nasional, konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 5,99 persen di tahun 2022. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 5,27 persen.

Konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi setelah konsumsi akhir rumah tangga di tahun 2023 yaitu sebesar 6,78 persen. Persiapan jelang PEMILU 2024 mendongkrak konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) hingga momen ketika Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan musyawarah ataupun pertemuan-pertemuan besar yang sebelumnya dilakukan secara daring atau virtual.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Seiring dengan konsumsi akhir LNPRT, konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan di tahun 2023 yang mencapai 5,10 persen, sedangkan di tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1,21 persen. PMTB Sumatera Selatan justru tumbuh dengan signifikan di tengah ketidakstabilan perekonomian. Pada tahun 2023, PMTB tumbuh sebesar 2,47 persen di tahun 2023.

<https://sumsel.bps.go.id>

A collage of financial charts and a magnifying glass on a dark background. The top left shows a magnifying glass over a dark surface. Below it is a bar chart with red and blue bars. At the bottom is a candlestick chart with red and blue bars. The right side of the image is a solid teal background with a white crosshair in the top right and bottom left corners.

INFLASI

<https://www.bps.go.id>

<https://sumsel.bps.go.id>

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (www.bi.go.id). Pengendalian inflasi selalu menjadi perhatian pemerintah terkait pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang merujuk pada terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan hidup masyarakat yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengakibatkan penurunan nilai mata uang terhadap barang dan jasa secara umum, dimana dibutuhkan semakin banyak uang untuk mendapatkan suatu barang dan/atau jasa dibandingkan sebelumnya, sehingga inflasi erat hubungannya dengan daya beli masyarakat.

BPS menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam menghitung inflasi. Perubahan pada IHK mengindikasikan tingkat perubahan harga di tingkat konsumen untuk barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang dianggap mewakili belanja kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2020, terjadi perubahan dalam tahun dasar yang digunakan untuk penghitungan IHK, dari sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012 menjadi tahun dasar 2018. Perubahan ini mempertimbangkan bahwa telah terjadi pergeseran konsumsi dan kebutuhan di masyarakat. Perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) antara lain dari segi

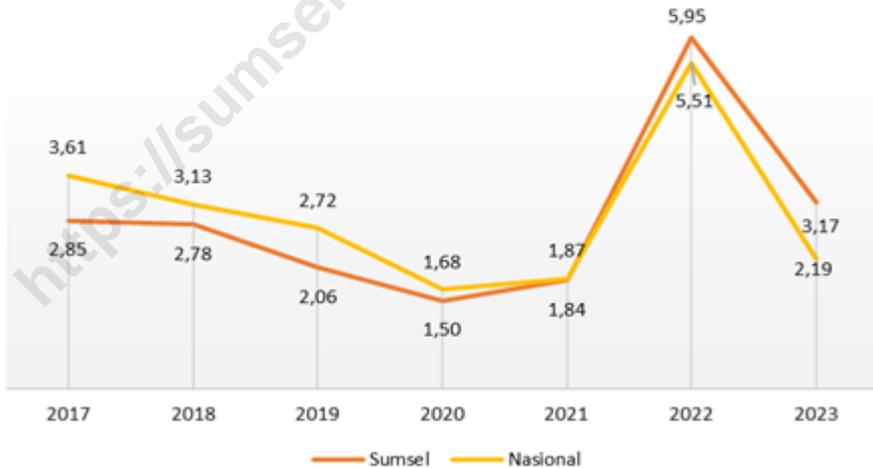
cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Dari segi pengelompokan komoditas, IHK (2018=100) didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018, dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999.

Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional

Inflasi terjadi akibat terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat di pasaran. Semakin tinggi tingkat kenaikan harga, maka semakin dalam juga terjadi inflasi. Dalam tiga tahun terakhir, kondisi inflasi di Indonesia sedikit banyak masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi wabah COVID-19, yang membawa dampak negatif yang besar di semua lini kehidupan manusia di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021, bahkan muncul varian baru menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berkenaan dengan mulai diberlakukannya program vaksinasi dan adanya pelanggaran mobilitas penduduk membuat perekonomian masyarakat mulai menggeliat kembali, inflasi nasional dan Sumatera Selatan di tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan, meskipun nilainya masih rendah. Secara kumulatif (*year-to-date*), inflasi Sumatera Selatan tercatat mengalami sedikit kenaikan, dari 1,50 persen di tahun 2020 menjadi 1,84 persen, sementara inflasi nasional naik dari 1,68 persen menjadi 1,87 persen. Inflasi yang cukup rendah ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat serta pasokan bahan makanan yang

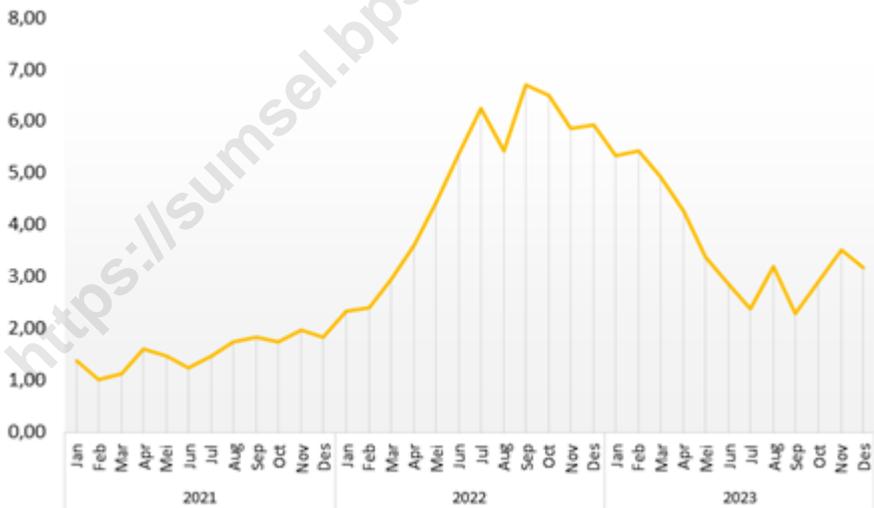
memadai. Inflasi yang terjadi di tahun 2021 didominasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya. Di Sumatera Selatan, hal ini sejalan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang utamanya adalah makanan. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai pulih dari pengaruh pandemi di tahun 2022 menimbulkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dibandingkan tahun 2021 sehingga mengakibatkan inflasi Sumatera Selatan naik mencapai 5,95 persen di tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,51 persen. Inflasi Sumatera Selatan di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3,17 persen, sementara besaran inflasi nasional lebih rendah, yakni 2,19 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional (year-to-date), 2017-2023

Capaian inflasi *year-on-year* di Sumatera Selatan tahun 2023 cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022, rentang inflasi juga semakin menuju rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3 persen \pm 1 persen (*y-o-y*). Secara umum, inflasi *year-on-year* di tahun 2023 terutama masih didorong oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah komoditas beras, cabai merah, dan rokok kretek filter. Selain itu, kenaikan harga pada kelompok pengeluaran untuk Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dan kelompok pengeluaran untuk Pendidikan juga turut meningkatkan inflasi di Sumatera Selatan tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan (*y-on-y*), 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan (m-to-m), 2021-2023

Inflasi Sumatera Selatan di awal tahun 2023, tepatnya di bulan Januari sebesar 0,35 persen akibat naiknya harga di sebagian besar kelompok pengeluaran. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang juga memiliki andil tertinggi bagi inflasi bulan Januari. Inflasi pada kelompok pengeluaran ini didorong oleh naiknya harga komoditas cabai merah, rokok kretek filter, dan bawang merah. Sementara kelompok pengeluaran untuk Transportasi mengalami deflasi yang disebabkan oleh penurunan harga pada tarif angkutan udara, bensin, angkutan antarkota, dan solar.

Sumatera Selatan kembali mengalami inflasi di bulan Februari 2023 sebesar 0,08 persen. Kenaikan harga-harga yang mengakibatkan inflasi disumbang oleh kelompok pengeluaran untuk

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dan kelompok pengeluaran untuk Pendidikan. Sementara itu, kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok pengeluaran untuk Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta kelompok pengeluaran untuk transportasi mengalami deflasi. Turunnya harga pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam adalah salah satu penyebab yang mendorong hal tersebut.

Harga-harga kembali mengalami kenaikan di bulan Maret dan April 2023, di mana inflasi tercatat mencapai 0,20 persen dan 0,33 persen. Inflasi pada periode ini masih bersumber dari kenaikan harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta kelompok pengeluaran untuk Transportasi terutama di masa menjelang hari raya Idul Fitri. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan makanan dan minuman serta faktor mobilitas masyarakat yang meningkat dalam rangka mudik lebaran menyebabkan naiknya permintaan untuk barang dan jasa terkait dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga.

Kembali normalnya permintaan terhadap layanan transportasi pasca-lebaran mengakibatkan turunnya tarif angkutan udara, angkutan antarkota, dan tarif kendaraan travel di bulan Mei 2023. Hal ini mendorong terjadinya deflasi di Sumatera Selatan sebesar -0,04 persen. Deflasi juga didorong oleh turunnya harga komoditas pada kelompok pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki, kelompok pengeluaran untuk Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta kelompok pengeluaran untuk Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga. Sementara harga-harga pada

kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman, dan Tembakau terpantau masih mengalami kenaikan di bulan Mei 2024.

Inflasi 0,39 persen dan 0,29 persen yang terjadi di bulan Juni dan Juli 2023 masih dipicu oleh naiknya harga-harga di kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas daging ayam ras. Naiknya harga beras, telur ayam ras, cabai merah, dan tomat juga mendukung terjadinya inflasi pada kedua bulan tersebut. Sementara penurunan harga komoditas pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau memiliki andil yang besar sehingga menyebabkan terjadinya deflasi di Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2023 sebesar -0,04 persen. Komoditas yang mengalami penurunan harga di bulan Agustus antara lain bawang merah, daging ayam ras, dan cabai merah.

Setelah sempat mengalami deflasi di bulan sebelumnya, pada empat bulan terakhir di tahun 2023, Sumatera Selatan terus mengalami inflasi hingga akhir tahun, yakni sebesar 0,37 persen di bulan September, 0,50 persen di bulan Oktober, 0,54 persen di bulan November, dan 0,15 persen di bulan Desember. Komoditas seperti bawang merah, tomat, gula pasir, dan daging ayam ras yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi hari besar di bulan Desember menghadapi peningkatan permintaan sehingga harganya beranjak naik.

The image features a dark background with several financial charts. In the upper left, a magnifying glass is positioned over a bar chart with red and blue bars. Below it, another bar chart is visible. At the bottom, a candlestick chart with red and blue bars is shown. The right side of the image is a solid teal color with a white crosshair in the top right corner and another white crosshair in the bottom left corner.

PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN

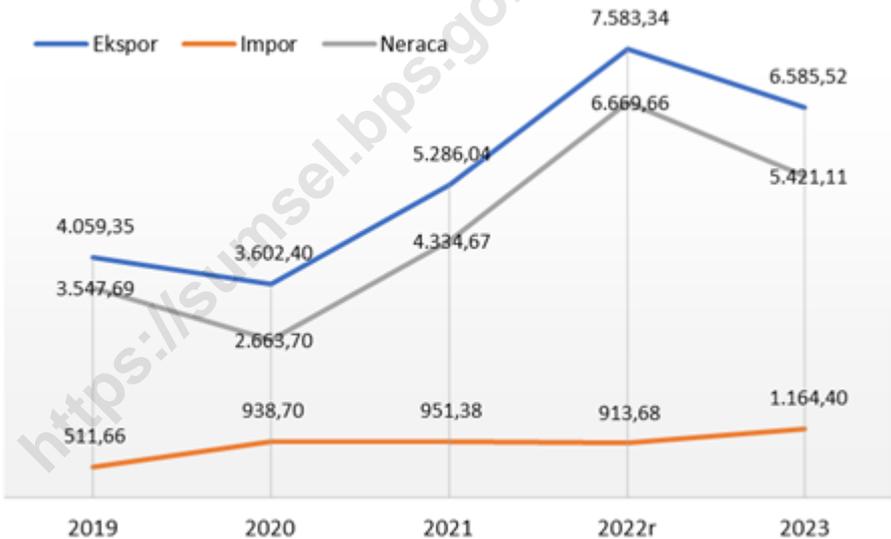
<https://sumsel.bps.go.id>

Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi.

Perdagangan luar negeri memiliki peranan yang penting dalam perekonomian dan pembangunan. Kegiatan perdagangan luar negeri, terutama ekspor yang merupakan salah satu sumber terbesar bagi penerimaan devisa. Dengan devisa tersebut negara/daerah dapat membeli barang-barang impor yang dibutuhkan untuk konsumsi dan menunjang sektor industri di wilayahnya.

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap perdagangan internasional Indonesia dan ekonomi global, tidak terkecuali Sumatera Selatan. Akibat pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola perdagangan dunia seperti, adanya sistem *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara yang mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang, penerapan protokol kesehatan yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman logistik, adanya larangan ekspor dan impor beberapa komoditas tertentu seperti pangan dan kesehatan, gangguan yang terjadi pada *supply* dan *demand*, juga perubahan pada pusat rantai pasokan global dari beberapa negara seperti, China, Jerman, dan Amerika Serikat.

Meskipun pandemi belum selesai di tahun 2021, program vaksinasi dan adaptasi yang dilakukan di sebagian besar lini kehidupan manusia mendorong pemulihan perekonomian dunia, tak terkecuali Sumatera Selatan. Neraca perdagangan Sumatera Selatan mulai menguat di tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Namun, kinerja ekspor yang menurun di tahun 2023 dibarengi dengan naiknya impor menyebabkan neraca perdagangan Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 18,70 persen, yakni dari US\$ 6.667,90 juta di tahun 2022 menjadi US\$ 5.421,11 juta di tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.1 Perkembangan Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Sumatera Selatan (juta US\$), 2019-2023

Surplus Neraca Perdagangan Sumatera Selatan

Kinerja neraca perdagangan Sumatera Selatan selalu mencatatkan surplus dalam kurun waktu 2019-2023. Surplus neraca perdagangan lima tahun terakhir tersebut terutama bersumber dari tingginya nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impor. Kondisi perekonomian dunia yang sulit akibat terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi nilai ekspor Sumatera Selatan yang turun ke angka US\$3.602,40 juta, serta didorong oleh tingginya peningkatan nilai impor menjadi US\$938,70 juta membuat neraca perdagangan Sumatera Selatan turun hingga 24,92 persen menjadi hanya US\$2.663,70 juta pada periode tersebut. Nilai impor masih meningkat tipis di tahun 2021 menjadi US\$951,38 juta, sementara nilai ekspor kembali menguat signifikan hingga naik 46,74 persen menjadi US\$5.286,04 juta sehingga neraca perdagangan Sumatera Selatan di tahun ini kembali meningkat menjadi US\$4.334,67 juta. Setelah sempat terpuruk di tahun 2020, neraca perdagangan terus meningkat hingga mencapai surplus tertinggi dalam lima tahun terakhir di tahun 2022, yakni sebesar US\$6.669,66 juta yang didukung oleh semakin menguatnya ekspor yang mencapai US\$7.583,34 juta dan sedikit terkontraksinya impor sebesar US\$913,68 juta.

Meskipun mengalami penurunan di tahun 2023, neraca perdagangan Sumatera Selatan masih mencatatkan surplus senilai US\$ 5.421,11 juta di tengah turunnya capaian ekspor sebesar 13,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya sementara nilai impor justru mengalami peningkatan sebesar 27,47 persen.

**Tabel 4.1 Ekspor Sumatera Selatan menurut Sektor, 2019-2023
(juta US\$)**

Sektor	2019	2020	2021	2022 ^r	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	270,68	176,27	92,62	436,01	463,15
Nonmigas	3.788,67	3.426,13	5.193,43	7.147,33	6.122,38
Pertanian	30,6	45,78	54,45	59,54	55,24
Industri Pen- golahan	2.990,53	2.779,26	3.393,93	3.706,24	3.194,64
Pertambangan dan Lainnya	767,53	601,08	1.745,04	3.381,55	2.872,50
Jumlah	4.059,35	3.602,40	5.286,04	7.583,34	6.585,53

Catatan: angka 2022 merupakan angka revisi

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekspor Sumatera Selatan

Kinerja ekspor yang menguatkan neraca perdagangan Sumatera Selatan masih didominasi oleh ekspor untuk komoditas nonmigas. Kendati menghadapi tantangan global terkait pandemi COVID-19 yang belum usai, ekspor komoditas nonmigas Sumatera Selatan yang sempat menunjukkan penurunan di tahun 2019 hingga 2020, kembali menunjukkan pertumbuhan positif cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 46,74 persen dan terus meningkat hingga mencapai nilai tertinggi selama lima tahun terakhir pada nilai US\$7.583,34 juta di tahun 2022. Namun, di tahun 2023 nilai ekspor Sumatera Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor Sumatera Selatan di tahun 2023 mencapai US\$6.585,53 juta, turun 13,16 persen dibandingkan nilai ekspor di tahun 2022. Kenaikan nilai ekspor pada sektor migas sebesar 6,22 persen tidak mampu

mengimbangi penurunan nilai ekspor pada sektor nonmigas yang mencapai 14,34 persen. Penurunan nilai ekspor sektor nonmigas terbesar disumbang oleh turunnya nilai ekspor sektor komoditas batubara sebesar 15,05 persen. Sementara penurunan ekspor produk industri pengolahan sebesar 13,80 persen disumbang oleh komoditas pulp, karet remah, kertas tisu, dan pupuk.

Kemendag melakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi peningkatan ekspor nonmigas antara lain dengan mengoptimalkan perjanjian perdagangan internasional. Sejumlah perjanjian perdagangan itu ialah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IKCEPA), *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IP-PTA), *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA), dan perjanjian lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor produk lebih banyak. Selain itu, untuk memastikan ekspor terus berjalan, pemerintah akan terus mengawal dan memastikan pengamanan perdagangan produk-produk Indonesia di luar negeri dengan diplomasi perdagangan. Pemerintah juga berkomitmen menjalani proses baku penyelesaian sengketa di WTO terkait bahan mentah Indonesia dan hambatan perdagangan produk biodiesel berbahan baku minyak sawit oleh Uni Eropa (sumber : <https://www.kemenkeu.go.id>).

Tiga negeri tujuan utama ekspor Sumatera Selatan tahun 2023 adalah Tiongkok, India, dan Malaysia. Ekspor ke tiga negara tersebut

berkontribusi lebih dari setengah total ekspor yang dilakukan oleh Sumatera Selatan pada periode tersebut sehingga kondisi perekonomian di tiga negara tersebut sangat berpengaruh pada kinerja ekspor Sumatera Selatan. Nilai ekspor produk dari Sumatera Selatan ke Tiongkok pada tahun 2023 mengalami kenaikan tipis 0,68 persen. Begitu pula dengan ekspor ke Malaysia yang naik 7,25 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara meskipun masih di posisi kedua nilai ekspor tertinggi Sumatera Selatan, nilai ekspor ke India mengalami penurunan cukup tajam sebesar 19,59 persen.

Impor Sumatera Selatan

Mekanisme impor dalam perdagangan internasional memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Negara melakukan impor antara lain karena produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri atau ongkos produksi akan lebih mahal bila diproduksi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan impor juga diambil guna menjaga stabilitas harga dalam negeri. Meskipun demikian, jika kebijakan impor tidak dijaga dan diawasi dikhawatirkan justru berdampak negatif terhadap pasar domestik.

Kementerian Perdagangan menerbitkan 3 peraturan menteri perdagangan (permendag) baru tentang ekspor dan impor untuk mempermudah pelayanan perizinan bagi pelaku usaha yang mulai berlaku pada 15 November 2021. Ketiga regulasi tersebut adalah Permendag No. 18/2021 tentang Barang Dilarang

Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang mencabut 3 permendag sebelumnya, Permendag No. 19/2021 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mencabut 31 Permendag sebelumnya, dan Permendag No. 20 /2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mencabut 84 Permendag sebelumnya (*ekonomi.bisnis.com*).

Kinerja impor Sumatera Selatan yang sempat turun di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, justru mengalami peningkatan di tahun 2020, tahun dimana pandemi COVID-19 mulai merebak. Impor komoditas untuk Barang Modal naik lebih dari tiga kali lipat di tahun 2020, menggeser posisi komoditas impor untuk Bahan Baku dan Penolong. Nilai impor Sumatera Selatan kembali meningkat di tahun 2021 didorong oleh peningkatan impor komoditas untuk Bahan Baku/Penolong, sementara impor komoditas Barang Modal turun. Nilai impor di tahun 2022 mengalami penurunan tipis sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai US\$913,68 juta. Nilai impor Sumatera Selatan mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2023 menjadi sebesar US\$1.164,41 juta. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan impor untuk komoditas Barang Konsumsi yang naik lebih dari enam kali lipat, serta impor untuk komoditas Barang Modal yang naik 115,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total nilai impor Sumatera Selatan di tahun 2023 sebesar US\$1.164,41 juta, 53,49 persennya merupakan impor yang berasal dari negara Tiongkok yakni mencapai US\$6222,81, diikuti

oleh negara Pantai Gading dengan impor senilai US\$79,60 juta atau 6,84 persen, dan Malaysia dengan nilai impor senilai US\$74,91 juta atau 6,43 persen dari total nilai impor.

**Tabel 4.2 Impor Sumatera Selatan menurut Sektor, 2019-2023
(juta US\$)**

Sektor	2019	2020	2021	2022 ^r	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barang Konsumsi	5,19	6,06	11,32	7,53	57,46
Bahan Baku/ Penolong	386,72	361,63	519,96	614,87	478,88
Barang Modal	119,74	571,01	420,1	291,27	628,07
Jumlah	511,66	938,7	951,38	913,68	1.164,41

Catatan: angka 2022 merupakan angka revisi

Sumber: Badan Pusat Statistik

A collage of financial charts and a magnifying glass on a dark background. The charts include a bar chart with red and blue bars and a candlestick chart with red and blue candles. A magnifying glass is positioned over the bar chart. The background is dark with a grid pattern.

PARIWISATA SUMATERA SELATAN

<https://sumsel.bps.go.id>

Pariwisata hingga saat ini masih menjadi sektor prioritas pemerintah karena dinilai mampu menjadi lokomotif pergerakan perekonomian bangsa. Sektor pariwisata bahkan menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara. Pengelolaan sektor pariwisata pun terus dikembangkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk membuat pariwisata Indonesia lebih maju dan dikenal di mata dunia. Sektor pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menjadi *country branding* dan meningkatkan penerimaan devisa serta dapat menarik pergerakan sektor lainnya.

Adanya pandemi COVID-19 yang menghantam pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi secara masif di berbagai lini dan pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Pembatasan sosial berskala global dan nasional menyebabkan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik tidak dapat berwisata.

Regulasi berupa pembatasan mobilitas penduduk yang terjadi di hampir di seluruh dunia untuk menahan laju penyebaran COVID-19 telah menimbulkan kelumpuhan pada sektor-sektor yang menopang kinerja pariwisata seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan pembatasan aktivitas perjalanan/wisata yang berdampak pada terganggunya pariwisata global. Pada awal tahun 2020, hampir semua destinasi global telah memberlakukan pembatasan perjalanan wisata. Di kawasan Afrika, Asia-Pasifik, dan Timur Tengah misalnya, telah dilakukan pembatasan penuh pada destinasi wisata untuk mencegah

meluasnya penyebaran virus. UNWTO juga menjelaskan bahwa pada April 2020, diperkirakan 96 persen dari 209 destinasi wisata di seluruh dunia telah menerapkan pembatasan, dimana 90 tujuan menutup sebagian/sepenuhnya dan 44 destinasi lainnya hanya ditutup untuk wisatawan asal negara tertentu (*COVID-19 Related Travel Restriction UNWTO, 2020*).

Pandemi COVID-19 juga membuat industri pariwisata Indonesia mengalami krisis. Sejak awal tahun 2020, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia terus menurun. Begitu pula dengan provinsi Sumatera Selatan, bahkan mulai bulan Maret 2020 hingga Desember 2020 tidak ada wisatawan asing yang berkunjung melalui pintu masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Selain berdampak pada perolehan devisa, pandemi juga akan berimbas pada sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya juga turut terdampak, seperti ditutupnya 1.266 hotel di 31 provinsi pada awal April (www.travel.kompas.com, 2020). Pandemi juga berdampak pada hilangnya pencaharian penduduk sekitar tempat wisata hingga pemutusan kerja yang berakibat pada meningkatnya pengangguran.

Pemerintah terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 termasuk pembangunan pariwisata melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan destinasi super prioritas, pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenities), pendekatan *storynomics tourism* yang mengangkat budaya dan kearifan lokal, serta mendorong kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk membangun pusat-pusat hiburan

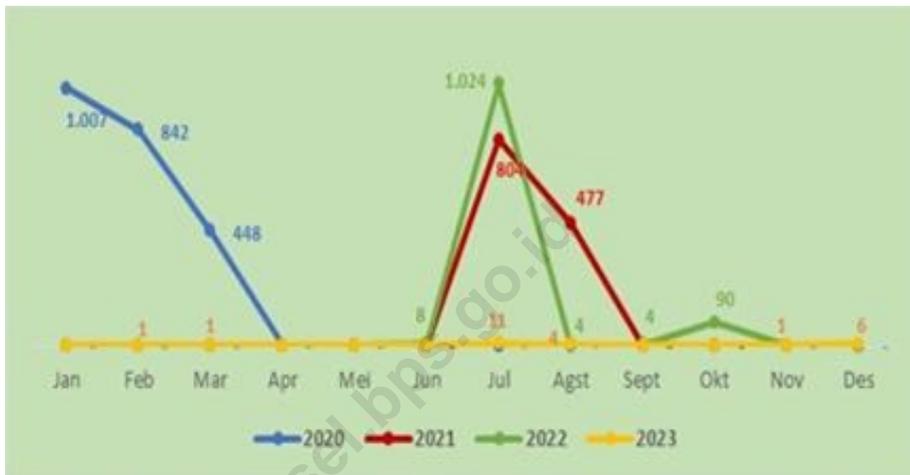
(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020). Promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta dalam mendorong pemulihan pariwisata juga semakin digencarkan. Guna mengatasi situasi yang semakin sulit, pemerintah akhirnya melonggarkan kebijakan pembatasan mobilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini penting mengingat keterbukaan aksesibilitas menuju destinasi wisata akan meningkatkan aktivitas pendukung pariwisata dan mendongkrak pendapatan yang dihasilkan dari sektor wisata.

Setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, sektor pariwisata kembali bangkit di tahun 2022. Bisa dikatakan, tahun 2022 menjadi tahun pemulihan sektor pariwisata. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kedua sektor yang menjadi penopang utama pariwisata. Sepanjang tahun 2022 di Sumatera Selatan, sektor Transportasi dan Pergudangan (H) serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) tumbuh signifikan, masing-masing tumbuh sebesar 11,63 persen dan 14,67 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibanding pertumbuhan sektor lainnya.

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Sepanjang tahun 2023 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Selatan melalui pintu masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hanya 24 kunjungan. Hal ini dikarenakan belum dibukanya rute penerbangan internasional secara komersial. Penerbangan internasional hanya dibuka untuk keperluan khusus seperti pemberangkatan Jemaah

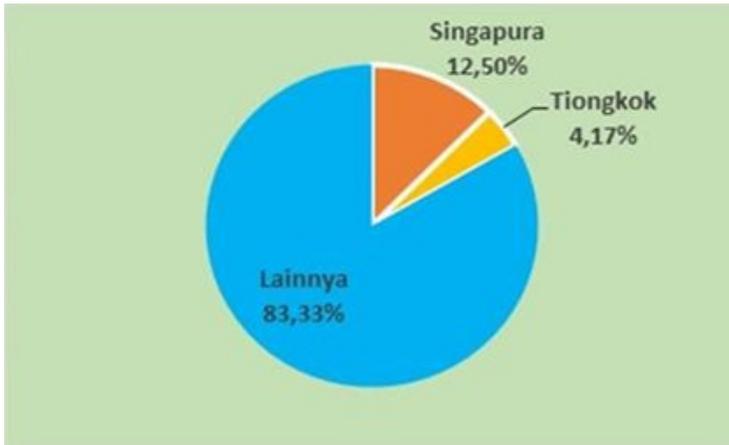
Haji Sumatera Selatan dan kegiatan latihan militer. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, jumlah wisman menurun drastis. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 tidak diadakan latihan gabungan militer antara tentara Indonesia, Amerika, dan Australia seperti pada tahun 2021 dan 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik

Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Selatan, 2020 -2023

Dilihat dari asal negara, jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Selatan pada periode Januari - Desember 2023 melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berasal dari negara Singapura sebanyak 3 kunjungan (12,50 persen), Tiongkok sebanyak 1 kunjungan (4,17 persen), dan paling banyak berasal dari warga negara lainnya (selain Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok) yang sebanyak 20 kunjungan (83,33 persen), sehingga total jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Selatan pada periode Januari – Desember 2023 sebanyak 24 kunjungan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik

Gambar 5.2 Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan, 2023

Sektor pariwisata yang maju harus didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas pendukung pariwisata tersebut antara lain meliputi ketersediaan hotel, restoran, serta akomodasi. Secara konsep, usaha akomodasi merupakan usaha bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Salah satu jenis akomodasi pendukung pariwisata adalah hotel/penginapan.

Indikator tingkat penghunian kamar hotel (TPK) dapat digunakan untuk melihat kinerja pariwisata di suatu wilayah. TPK merupakan perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar minat pengunjung/wisatawan pada akomodasi hotel tertentu di suatu

daerah. Selain itu, TPK dapat dijadikan suatu ukuran awal untuk mengevaluasi kondisi akomodasi pariwisata di suatu daerah sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatawan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik

Gambar 5.3. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Selatan (persen), 2021 - 2023

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Selatan pada Tahun 2023 tercatat rata-rata sebesar 54,08 persen, atau naik 0,75 persen poin dibanding TPK hotel Tahun 2022 yang rata-rata sebesar 53,32 persen. Selain TPK, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sektor pariwisata adalah rata-rata lama menginap tamu baik wisatawan asing maupun domestik. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa lama seorang wisatawan menginap disuatu akomodasi.

Rata-rata lama menginap seluruh tamu hotel bintang tahun 2023 terlama pada bulan Maret yang tercatat sebesar 1,50 hari. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2022 dimana rata-rata

lama menginap seluruh tamu hotel bintang tahun 2022 terlama pada bulan Desember yang tercatat sebesar 1,68 hari. Hampir rata-rata lama menginap seluruh tamu hotel bintang tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali di bulan Januari sampai dengan April.

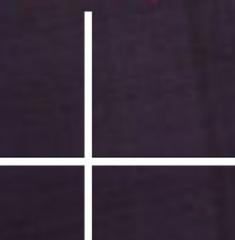


Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik

Gambar 5.4 Rata-rata Lama Menginap Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Selatan (hari), 2021 - 2023



KETENAGAKERJAAN SUMATERA SELATAN



<https://sumsel.bps.go.id>

Pasar tenaga kerja memainkan peran penting dalam perekonomian di suatu wilayah. Akses kuantitas dan kualitas pekerjaan yang cukup dapat berdampak pada perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerjaan yang layak, upah yang sesuai, dan perlindungan tenaga kerja merupakan kondisi yang menjamin keberlanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi. Penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai adalah akses utama bagi penduduk untuk meningkatkan taraf hidup, melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan juga berperan serta dalam kemajuan ekonomi.

Ketenagakerjaan dan perekonomian memiliki hubungan yang cukup erat. Kondisi perekonomian dalam jangka pendek dan jangka panjang memiliki pengaruh besar pada pasar tenaga kerja. Teori ekonomi mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja memiliki hubungan yang positif, karena jumlah tenaga kerja yang banyak akan menghasilkan output yang lebih banyak. Akan tetapi, tren pada saat ini menunjukkan transformasi yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja. Dalam dekade terakhir, meskipun pertumbuhan ekonomi global telah melambat atau setidaknya mengalami stagnasi, pertumbuhan lapangan kerja relatif kuat dan tingkat pengangguran global menurun.

Peningkatan kesempatan kerja yang produktif akan membawa Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, ke perekonomian yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan harus diiringi dengan

terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumsel, terutama di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Angkatan Kerja di Sumatera Selatan

Angkatan kerja merupakan salah satu modal/sumber daya paling potensial dan aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, penyerapan angkatan kerja yang tinggi akan mendorong kemajuan ekonomi itu sendiri. Angkatan kerja yang diukur dalam analisis ini adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara bekerja dan pengangguran.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agust 2021 ¹⁾	Agust 2022 ¹⁾	Agust 2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	6.396,61	6.489,87	6.487,76
1. Angkatan Kerja (ribu jiwa)	4.398,91	4.497,96	4.588,17
- Bekerja	4.179,71	4.289,70	4.399,66
- Pengangguran	219,20	208,26	188,51
2. Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	1.997,70	1.991,91	1.899,59

Catatan : 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Sumatera Selatan yang potensial bekerja terus mengalami peningkatan. Pada Agustus 2021, jumlah angkatan kerja mencapai 4.398,91 ribu orang, meningkat menjadi 4.497,96 ribu orang pada Agustus 2022, dan meningkat kembali menjadi 4.588,17 ribu orang pada Agustus 2023. Dalam satu tahun, dari Agustus 2022 s.d. Agustus 2023, peningkatan jumlah angkatan kerja Sumatera Selatan mencapai 90,21 ribu orang atau

sebesar 2,01 persen. Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja Sumatera Selatan mengalami penurunan selama periode 2021-2023. Pada Agustus 2021, jumlah bukan angkatan kerja mencapai 1.997,70 ribu orang, berkurang menjadi 1.991,91 ribu orang pada Agustus 2022, dan kembali mengalami penurunan pada Agustus 2023 sebanyak 92,32 ribu orang menjadi 1.899,59 ribu orang.

Besarnya jumlah angkatan kerja ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Pemerintah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, tenaga kerja yang tersedia dapat terserap secara optimal. Tidak hanya itu, tenaga kerja juga perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Kompetensi tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dan berdampak pada perekonomian Sumsel yang semakin membaik.

Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi di banyak daerah berkembang adalah kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Penduduk laki-laki terus mendominasi angkatan kerja di Sumatera Selatan. Adapun angkatan kerja laki-laki di Sumatera Selatan tahun 2023 mencapai 2.817,06 ribu orang, sementara itu 1.771,11 ribu orang merupakan angkatan kerja perempuan. Dengan demikian, perbandingan angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan hampir 8:5. Diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun demikian, pemerintah tentu terus berupaya mengurangi kesenjangan gender di tempat kerja serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Angkatan kerja terdiri dari dua kelompok yaitu, penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Jumlah penduduk Sumatera Selatan usia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat sebesar 4.399,66 ribu orang pada tahun 2023 dengan rincian 2.705,45 ribu orang pekerja laki-laki dan 1.694,21 ribu orang pekerja perempuan. Secara umum jumlah penduduk yang bekerja meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 4.289,70 ribu orang. Hal ini sejalan dengan jumlah pengangguran yang berkurang dari 208,26 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 188,51 ribu orang pada tahun 2023. Jika dirinci menurut jenis kelamin, jumlah pengangguran Sumsel tahun 2023 adalah 111,61 ribu orang laki-laki dan 76,90 ribu orang perempuan.

Tabel 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan/Jenis Kelamin	Agust 2021 ¹⁾	Agust 2022 ¹⁾	Agust 2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	4.398,91	4.497,96	4.588,17
- Laki-laki	2.675,89	2.787,26	2.817,06
- Perempuan	1.723,01	1.710,69	1.771,11
Bekerja (ribu jiwa)	4.179,71	4.289,70	4.399,66
- Laki-laki	2.546,35	2.661,07	2.705,45
- Perempuan	1.633,36	1.628,63	1.694,21
Pengangguran (ribu jiwa)	219,20	208,26	188,51
- Laki-laki	129,54	126,19	111,61
- Perempuan	89,65	82,06	76,90

Catatan : 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan dan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam dunia ketenagakerjaan juga dapat tergambar dari beberapa indikator ketenagakerjaan. Indikator tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kedua indikator ini disajikan berdasarkan beberapa disagregasi, yaitu jenis kelamin dan klasifikasi daerah tempat tinggal. Disagregasi tersebut dimaksudkan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan untuk populasi tertentu. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk pertumbuhan yang inklusif dan merata.

Tabel 6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023

Daerah/Jenis Kelamin	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-Laki	78,38	81,32	82,50
Perempuan	52,75	51,89	53,80
Total	65,57	66,45	68,10
Perdesaan			
Laki-Laki	85,2	87,12	87,21
Perempuan	55,64	54,23	56,71
Total	70,71	71,08	72,42
Perkotaan + Perdesaan			
Laki-Laki	82,66	84,95	85,39
Perempuan	54,54	53,32	55,54
Total	68,77	69,31	70,72

Catatan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Proporsi penduduk usia kerja yang berpotensi atau yang aktif secara ekonomi di Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, TPAK tercatat sebesar 68,77 persen kemudian meningkat menjadi 69,31 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 70,72 persen pada tahun 2023. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Hal yang menarik adalah pada tahun 2022, di saat TPAK laki-laki meningkat, justru TPAK perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,32 persen. Hal tersebut berarti bahwa dari 10 perempuan berusia 15 tahun ke atas di Sumatera Selatan, 5 sampai 6 orang di antaranya berpotensi aktif secara ekonomi. Masih rendahnya TPAK perempuan ini disebabkan kaum perempuan lebih cenderung masuk ke bukan angkatan kerja seperti mengurus rumah tangga.

Selanjutnya kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap sumber daya manusia yang tersedia dapat tergambar melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sepanjang periode tahun 2021-2023, TPT Sumatera Selatan terus mengalami penurunan dari 4,98 persen pada tahun 2021 menjadi 4,11 persen pada tahun 2023. Hal yang sama berlaku jika dilihat menurut jenis kelamin. TPT laki-laki dari 4,84 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 3,96 persen pada tahun 2023. Sementara untuk TPT perempuan dari 5,20 persen pada tahun 2021 menurun menjadi 4,34 persen di tahun 2023.

Tabel 6.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023

Daerah/Jenis Kelamin	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-Laki	8,15	7,71	6,45
Perempuan	8,93	6,83	5,78
Total	8,46	7,36	6,18
Perdesaan			
Laki-Laki	3,03	2,75	2,48
Perempuan	3,02	3,55	3,43
Total	3,03	3,05	2,84
Perkotaan + Perdesaan			
Laki-Laki	4,84	4,53	3,96
Perempuan	5,20	4,80	4,34
Total	4,98	4,63	4,11

Catatan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

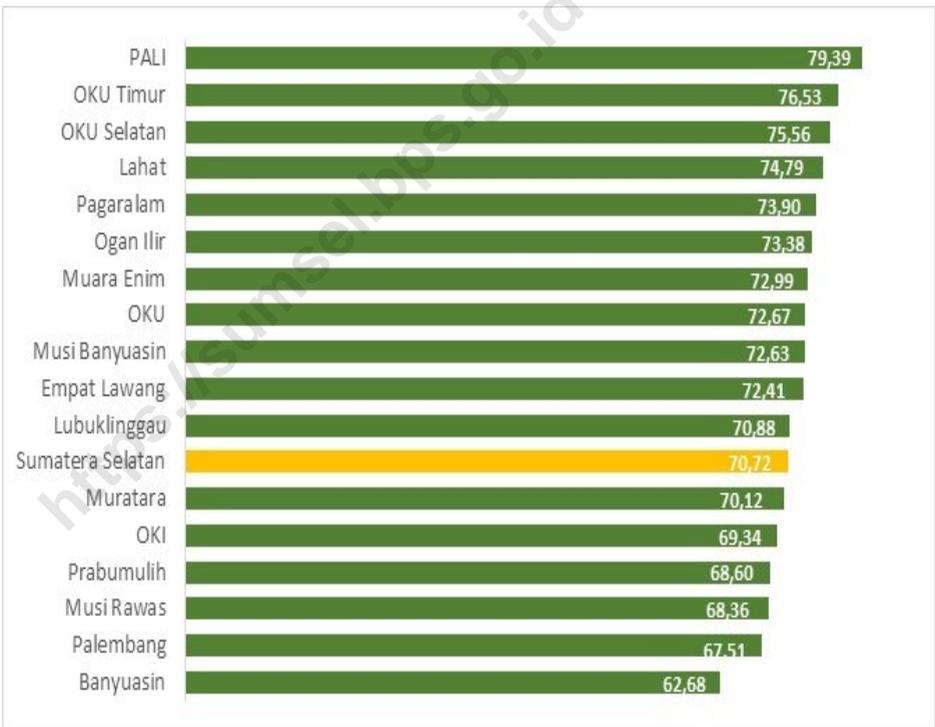
2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Keadaan sosial geografis dan keterjangkauan wilayah menjadi salah satu faktor perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tidak terkecuali pada kondisi ketenagakerjaan. Perbedaan kondisi ketenagakerjaan pada setiap wilayah tentunya membutuhkan kebijakan yang berbeda pula. Kebijakan ketenagakerjaan perlu dibangun pada tingkat regional karena setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda-beda. Selain itu, untuk pencapaian pembangunan yang inklusif dan merata juga perlu memperhatikan pembangunan ketenagakerjaan yang menghilangkan kesenjangan antar wilayah.

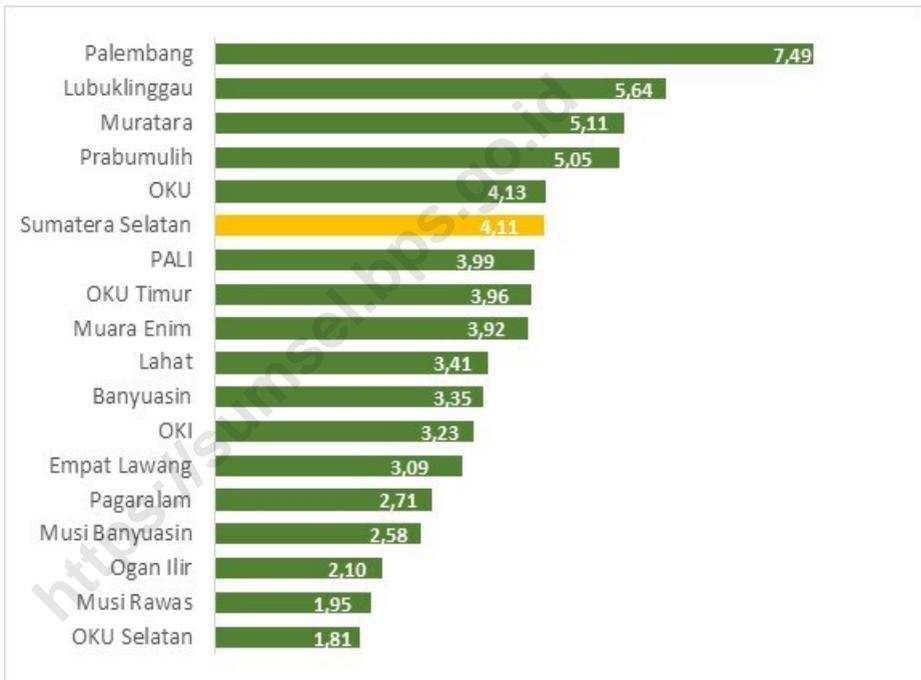
Pada tahun 2023, terdapat 11 kabupaten/kota dengan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di atas TPAK Sumatera Selatan. Adapun TPAK kabupaten/kota di Sumatera Selatan berada pada kisaran angka 62 s.d. 79 persen. TPAK tertinggi adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (79,39 persen), Kabupaten OKU Timur (76,53 persen), dan Kabupaten OKU Selatan (75,56 persen). Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki TPAK terendah adalah Kabupaten Banyuasin (62,68 persen), Kota Palembang (67,51 persen) dan Kabupaten Musi Rawas (68,36 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2023

Selain TPAK, tiga kabupaten/kota dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi meliputi Kota Palembang (7,49 persen), Kota Lubuk Linggau (5,64 persen), dan Kabupaten Musi Rawas Utara (5,11 persen). Di sisi lain, tiga kabupaten/kota dengan TPT terendah adalah Kabupaten OKU Selatan (1,81 persen), Kabupaten Musi Rawas (1,95 persen) dan Kabupaten Ogan Ilir (2,10 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan, 2023

Analisis ketenagakerjaan juga dapat dilihat berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal. TPT di perdesaan selalu lebih rendah dibanding di perkotaan. Selama periode 2021-2023, TPT

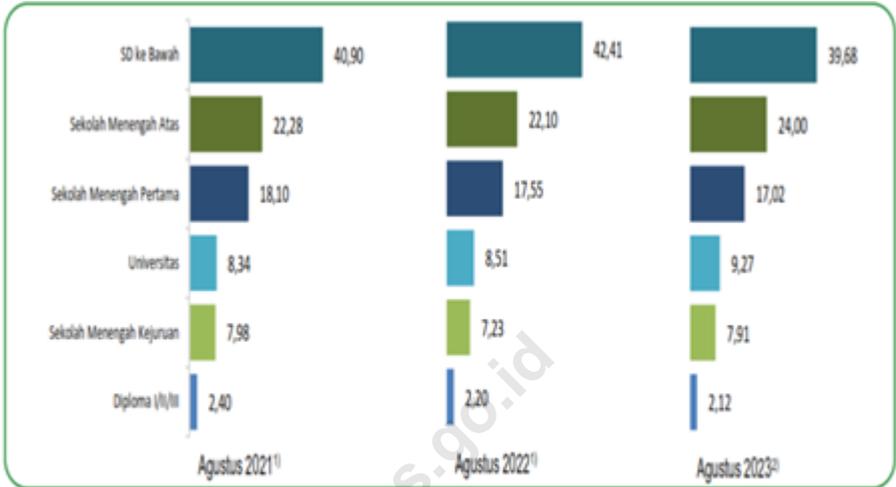
perkotaan berada di atas angka 6 persen, sementara itu TPT perdesaan masih di bawah angka 4. Kondisi ini dapat disebabkan adanya perpindahan penduduk perdesaan ke perkotaan. Para pencari kerja di perdesaan yang berpendidikan dan berkompentensi cenderung enggan bekerja di sektor pertanian dan memilih untuk mengadu nasib di perkotaan. Selain itu, pencari kerja berpendidikan di perkotaan memiliki kecenderungan untuk menunggu pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan mereka.

Rendahnya Pendidikan Penduduk yang Bekerja

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, unggul dan kompeten akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebagai modal utama, SDM harus memiliki daya saing untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerahnya. Tentu saja ketersediaan SDM yang handal harus dapat memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja di pasar. Kompetensi tenaga kerja harus mampu menjawab tantangan menuju era revolusi industri 4.0 atau yang biasa disebut industri digital.

Namun, sayangnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Selatan, yang diukur dengan tingkat pendidikannya, masih cukup rendah. Pada tahun 2023, sekitar 39,68 persen tenaga kerja berpendidikan SD kebawah. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini dapat berdampak pada rendahnya produktivitas kerja yang dihasilkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian memberikan tantangan yang cukup besar yang berujung pada tuntutan daya saing yang tinggi. Hal tersebut tentu menuntut perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan yang tinggi untuk menjaga eksistensi di dalam persaingan yang ada. Oleh

karena itu, tenaga kerja yang ada perlu ditingkatkan capaian pendidikannya agar memiliki kompetensi keterampilan yang tinggi.



Catatan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

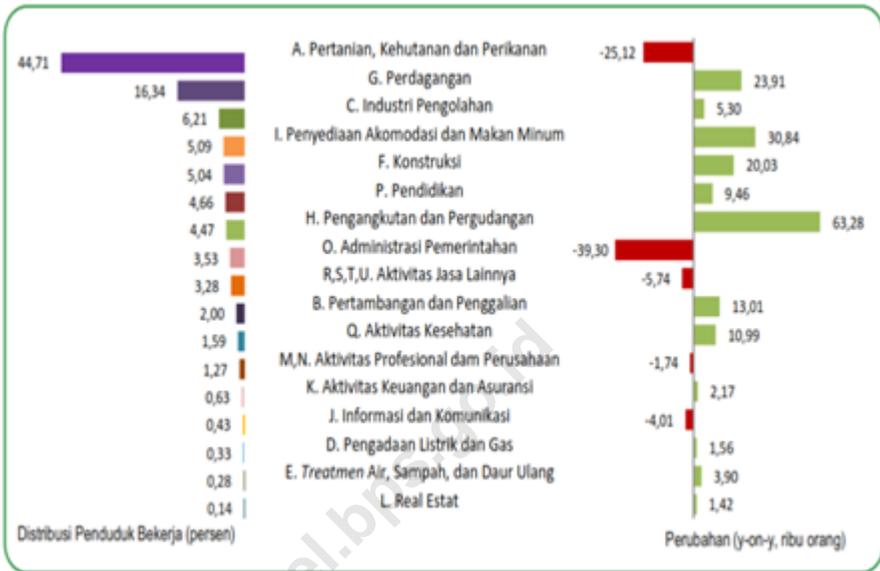
Gambar 6.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2023

Tiga Lapangan Usaha Penyerap Tenaga Kerja Terbesar

Struktur ketenagakerjaan juga dapat dianalisis dari jenis dan lapangan pekerjaan yang bermacam-macam. Jenis lapangan pekerjaan ini telah tercantum di dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Analisis ini diperlukan untuk melihat kemampuan daya serap tenaga kerja pada setiap lapangan usaha. Analisis distribusi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan tersebut akan menunjukkan sektor usaha yang dominan dalam pasar tenaga kerja Sumatera Selatan, memiliki eksistensi yang

tinggi, dan berkontribusi terhadap perekonomian Sumsel.

Adapun struktur tenaga kerja di Sumatera Selatan menurut



Catatan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

lapangan usaha didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Lapangan usaha pertanian yang meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi andalan dengan menyerap sekitar 44,71 persen tenaga kerja di Sumsel pada tahun 2023. Artinya hampir setengah tenaga kerja Sumsel bekerja pada lapangan usaha pertanian. Meskipun pertanian mampu menyerap hampir setengah tenaga kerja Sumsel tetapi kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap

ekonomi Sumsel hanya sekitar 13,10 persen. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian.

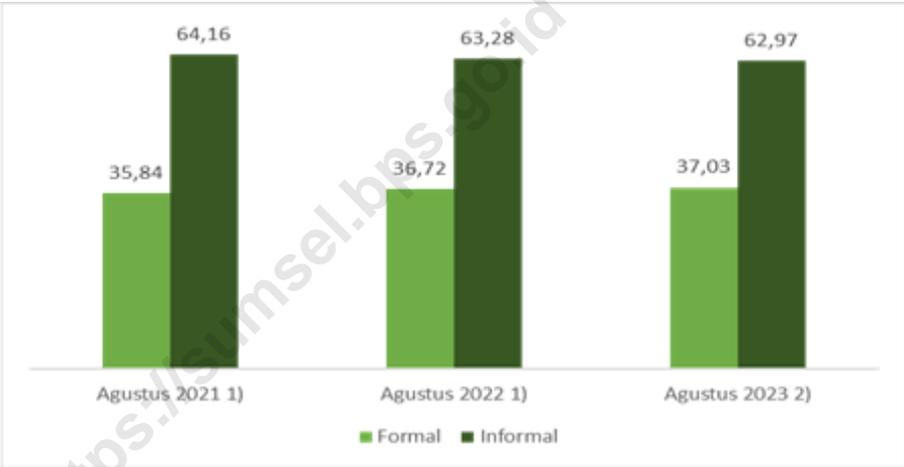
Lapangan usaha perdagangan yang meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, berada pada posisi ke dua sebagai lapangan usaha yang mampu menyerap sekitar 16,34 persen tenaga kerja. Sementara itu lapangan usaha industri pengolahan berada pada posisi ke tiga dengan menyerap sekitar 6,21 persen tenaga kerja Sumatera Selatan. Meskipun demikian, lapangan usaha industri pengolahan menjadi kontributor kedua tertinggi dengan menyumbang 17,84 persen perekonomian Sumatera Selatan.

Dominasi Pekerja Informal di Pasar Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja yang terus bertambah harus diiringi dengan penyediaan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Tenaga kerja informal masih cukup mendominasi dalam perekonomian Sumatera Selatan. Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 62,97 persen, sementara itu penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 37,03 persen.

Selama tahun 2021 dimana masih terjadi pandemi COVID-19, tampak yang bekerja di kegiatan informal lebih banyak dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut dapat dipahami karena selama pandemi, berbagai kebijakan pemerintah dan perusahaan formal telah menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan. Akibatnya banyak juga di antaranya yang beralih bekerja pada sektor informal. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai berkurang, persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pun berkurang.



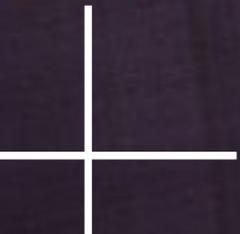
Catatan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015
2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/ Informal di Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2023



PENUTUP



<https://sumsel.bps.go.id>

Dinamika ekonomi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan sejumlah perkembangan yang menarik. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini tercatat sebesar 5,08 persen, sedikit menurun dari 5,23 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 terutama didorong oleh sektor-sektor kunci seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Sementara PDRB menurut penggunaan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 60,63 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 30,37 persen.

Di sisi inflasi, Sumatera Selatan berhasil menekan angka inflasi hingga 3,17 persen pada tahun 2023, menurun dari inflasi sebesar 5,94 persen tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2023 terutama disebabkan oleh lonjakan harga kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Dalam perdagangan internasional, Sumatera Selatan mencatat posisi surplus senilai US\$5.421,11 juta, meskipun nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 13,14 persen dan nilai impor meningkat sebesar 27,47 persen. Ekspor didominasi oleh komoditas nonmigas, sementara impor lebih banyak terdiri dari bahan baku/penolong dan barang modal.

Sektor pariwisata Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat rendah, hanya mencapai 24 kunjungan pada tahun 2023. Namun, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang menunjukkan angka yang cukup baik, dengan rata-rata sebesar 54,08 persen. Di sektor ketenagakerjaan, terdapat peningkatan

positif dalam TPAK yang mencapai 70,72 persen, dan penurunan TPT menjadi 4,11 persen. Meskipun demikian, tantangan utama tetap ada pada rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dan ketimpangan gender dalam angkatan kerja.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis yang penting. Penguatan sektor industri pengolahan perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga harus didorong agar dapat mendiversifikasi sumber pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan visi transformasi ekonomi yang diarahkan pada penerapan pertanian organik dan sistem pertanian regeneratif, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri dan pariwisata.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan transportasi sangat penting untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Demikian pula, infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas cepat ke/dari kawasan strategis industri dan pariwisata. Bandara ini harus dikembangkan menjadi hub internasional dengan

peningkatan kapasitas landasan pacu, terminal penumpang, dan fasilitas kargo untuk mendukung peningkatan lalu lintas penerbangan internasional dan domestik. Fasilitas pendukung seperti area komersial, hotel, dan transportasi terintegrasi juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpang dan menarik lebih banyak wisatawan serta investor ke Sumatera Selatan. Selain itu, pembangunan pelabuhan laut yang memadai akan meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperluas akses pasar ekspor Sumatera Selatan.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, langkah utama adalah memastikan pasokan bahan pokok yang stabil dan terjangkau. Kebijakan stok pangan dan distribusi yang efisien harus diimplementasikan dengan baik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) perlu ditingkatkan untuk mengendalikan inflasi secara efektif dan terkoordinasi. Mengoptimalkan peran BUMD dan koperasi dalam penyediaan bahan pokok juga dapat menjadi solusi untuk menstabilkan harga.

Untuk memperkuat perdagangan internasional, diversifikasi pasar ekspor harus menjadi fokus utama. Identifikasi dan pengembangan pasar ekspor baru akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan melindungi produk domestik. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk ekspor melalui standarisasi internasional sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Di sektor pariwisata, promosi wisata yang lebih intensif harus dilakukan dengan strategi pemasaran yang efektif dan kerja sama dengan sektor swasta. Infrastruktur pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan objek wisata perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk membuat Sumatera Selatan lebih menarik bagi wisatawan. Pengembangan wisata berbasis budaya dan alam yang unik di Sumatera Selatan dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, peningkatan kapasitas dan fasilitas di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Akhirnya, peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi prioritas. Program pelatihan dan pendidikan yang relevan harus diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. Kesetaraan gender dalam angkatan kerja perlu didorong dengan kebijakan yang inklusif, yang mendorong partisipasi perempuan dan mengurangi diskriminasi gender di tempat kerja. Fokus pada pendidikan kejuruan dan pelatihan berbasis industri dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil di sektor-sektor prioritas.

Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, Sumatera Selatan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Integrasi yang baik antara kebijakan diversifikasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengendalian inflasi, penguatan perdagangan internasional, promosi pariwisata, dan peningkatan kualitas tenaga kerja akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan Sumatera Selatan yang maju dan

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro No.1131, Palembang 31029
Telp. (0711) 351665
Homepage: <http://sumsel.bps.go.id>, Email: bps1600@bps.go.id

ISSN 2527-8002

